

**KEBIJAKAN PENJAMINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI



Oleh :

DOOHAN PRAMONO PUTRA
NPM : 17300100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN PENJAMINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DOOHAN PRAMONO PUTRA
NPM. 17300100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**KEBIJAKAN PENJAMINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA



OLEH :

DOOHAN PRAMONO PUTRA
NPM. 17300100

Surabaya, 29 Juli 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**KEBIJAKAN PENJAMINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DOOHAN PRAMONO PUTRA
NPM. 17300100

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 29 JULI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Bambang Yunarko, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Seto Cahyono, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kekehadirat Allah S.W.T. karena atas segala limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-NYA, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Kebijakan Penjaminan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”* dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih banyak, dan saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayah Sumono dan Ibu Kati, serta Kakak Penulis Sony Irawan. yang telah memberi dorongan baik moral, materil, dan doa yang tiada habisnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. SP.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan semangat yaitu kepada:

1. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah memberi semangat kepada saya, di saat saya merasakan hambatan di dalam mengerjakan skripsi ini. Yaitu Arum Kusumawati, Rahmat Fadilah, Krisna Tri, Afif Kamil, dan Nizam Utsman.
2. Terima kasih untuk para Senior dan Alumni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak sekali membantu, memberi saran dan motivasi, serta selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, dukungan doa dan semangat yang sangat berarti bagi saya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan Universitas dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi Penulis pribadi.

Surabaya, 29 Juli 2021

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

DOOHAN PRAMONO PUTRA

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Doohan Pramono Putra

NPM : 17300100

Alamat : Jl. Kandangan Dharma I No. 10, Kota Surabaya.

No. Telp : 081332870746

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **KEBIJAKAN PENJAMINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Doohan Pramono Putra
NPM : 17300100

ABSTRAK

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (untuk selanjutnya disebut Covid-19) di Indonesia membawa dampak tidak hanya di sektor kesehatan akan tetapi hal ini juga telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Dalam menanggapi masalah tersebut, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengambil langkah konkrit dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (untuk selanjutnya disebut Perppu No 1 Tahun 2020).

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Pemerintah menerbitkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020. Tujuan dari dibentuknya kebijakan atau program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020. Di dalam program PEN terdapat 4 program, salah satunya yang akan dibahas adalah Program Penjaminan oleh Pemerintah terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis bentuk-bentuk kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia di masa Pandemi terkhusus kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM. Kedua, untuk menganalisis akan penerapan kebijakan ekonomi dalam hal pemberian jaminan dari Pemerintah terhadap UMKM dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Dalam menanggapi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (untuk selanjutnya disebut PEN) sebagaimana diatur di dalam Perppu No. 1 Tahun 2020. Di dalam kebijakan PEN terdapat 4 (empat) metode atau cara yang akan digunakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2020, yaitu Penanaman Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi, dan Usaha Besar. Bahwa Pada PEN khususnya program penjaminan oleh Pemerintah ini, para pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman modal kerja atau melakukan restrukturisasi kredit dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam PMK No. 71 Tahun 2020. Para Pelaku usaha UMKM dalam hal ini dibebani dengan adanya Imbal jasa penjaminan dan hak regres, pembebanan tersebut tentu melanggar asas-asas yang ada di dalam AAUPB.

Kata Kunci : darurat, kebijakan, mekanisme, penjaminan.

ABSTRACT

The 2019 Coronavirus Disease (hereinafter referred to as Covid-19) pandemic in Indonesia has an impact not only on the health sector but this has also brought about changes in the movement of the community's economic structure. In responding to this problem, every policy and action taken in any case (including the handling of covid-19) must be based on law as legality in acting, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government takes concrete steps by issuing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability (hereinafter referred to as Perppu No. 1 of 2020).

Based on the regulation above, the Government issues a National Economic Recovery Policy (hereinafter referred to as PEN) as regulated in Article 11 paragraph (1) of Law no. 2 of 2020. The purpose of the establishment of this PEN policy or program is to protect, maintain and improve the economic capacity of business actors from the real sector and the financial sector in carrying out their business as regulated in Article 11 paragraph (2) of Law no. 2 of 2020. In the PEN program there are 4 programs, one of which will be discussed is the Guarantee Program by the Government for MSMEs. This study aims first to analyze the forms of the Indonesian Government's economic policies during the Pandemic, especially the National Economic Recovery policy for MSMEs. Second, to analyze the implementation of economic policies in terms of providing guarantees from the Government to MSMEs in the perspective of the General Principles of Good Governance.

The research method used in this thesis uses a statute approach and a conceptual approach.

Based on the results of this study, the researcher stated that in response to the Covid-19 pandemic, the Government of Indonesia issued a National Economic Recovery Policy (hereinafter referred to as PEN) as regulated in Perppu No. 1 of 2020. In the PEN policy there are 4 (four) methods or methods that will be used by the Government as regulated in Article 4 of PP No. 23 of 2020, namely State Investment, Fund Placement, Government Investment, and/or Government Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises, Cooperatives, and Large Enterprises. Whereas in PEN, especially the guarantee program by the Government, business actors in applying for working capital loans or conducting credit restructuring with the mechanism as regulated in PMK No. 71 of 2020. MSME business actors in this case are burdened with the existence of guarantee fees and regress rights, these charges certainly violate the principles contained in the AAUPB.

Keywords: *emergency, policy, mechanism, guarantee.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSERTUJUAN DEWAN	iii
PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	6
C. Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pertanggungjawaban	22
BAB II BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH INDONESIA DI MASA PANDEMI TERKHUSUS KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP UMKM	24
A. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19	24

B. Penetapan Status Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19 di Indonesia	35
C. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Terhadap Perlindungan Kelangsungan UMKM	39
BAB III MEKANISME PENERAPAN KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM HAL PEMBERIAN JAMINAN DARI PEMERINTAH TERHADAP UMKM DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK		
A. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik Dalam Sistem Hukum Indonesia	41
B. Mekanisme Penerapan Program Penjaminan Oleh Pemerintah Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	55
C. Kebijakan Program Penjaminan oleh Pemerintah Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	63
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR BACAAN		